

ANALISIS PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (STUDI KASUS TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DI DESA FAFINESU A, KECAMATAN INSANA FAFINESU, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA)

Yohanes Didimus Naakteas, Marisa S. B. Seran², Andre Pattipeilohy³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

²Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

³Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

didimusnaikteas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pembangunan jalan usaha tani dalam mendukung aksesibilitas dan produktivitas pertanian masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Warga Desa Fafinesu A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan usaha tani telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses transportasi hasil pertanian. Dari aspek sasaran program, pembangunan jalan usaha tani telah menyasar kebutuhan petani dalam meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Sosialisasi program dilakukan melalui musyawarah desa, namun masih ada masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan tujuan program terlihat dari meningkatnya aksesibilitas petani terhadap lahan pertanian serta kemudahan dalam pemasaran hasil pertanian, meskipun masih terdapat kendala dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Pemantauan program dilakukan secara berkala oleh pemerintah desa dan kelompok tani, namun masih memerlukan sistem pengawasan yang lebih terstruktur untuk memastikan jalan tetap dalam kondisi baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan usaha tani di Desa Fafinesu A telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan aksesibilitas pertanian. Namun, untuk menjaga keberlanjutannya, diperlukan perbaikan dalam sistem pemeliharaan serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Kata Kunci : Infrastruktur, Jalan Usaha Tani, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Peran infrastruktur dalam pembangunan pertanian saat ini menjadi salah satu isu yang diangkat oleh pemerintah. Hal ini tidak lain karena infrastruktur memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian dan sebaliknya tingkat ekonomi yang lebih tinggi mempengaruhi ketersediaan infrastruktur terutama pada sektor pertanian yang lebih bernilai. Hal ini terkait erat dengan upaya pencapaian tujuan program pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya jalan pertanian yang merupakan salah satu sub sistem hilir yang diharapkan dapat mendukung pengolahan dan pemasaran hasil pertanian(tanaman pangan). Lanjut, Jaringan infrastruktur yang baik merupakan faktor penting untuk pertumbuhan, ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Dari perspektif ekonomi mikro, infrastruktur juga mendukung mobilitas manusia sebagai pelaku

ekonomi, mulai dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi hingga memfasilitasi aliran input.

Desa Fafinesu A adalah sebuah desa di Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa yang jumlah penduduknya 1.345 jiwa menganggap pembangunan jalan usaha tani dianggap sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan pertanian di Desa. Secara umum jalan pertanian di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu masih belum memadai sehingga belum dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pembangunan jalan pertanian, sasaran untuk memenuhi persyaratan teknis kendaraan dalam pengangkutan produk dan produksi lainnya.

Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Masyarakat seringkali hanya menjadi obyek tersebut tanpa dilibatkan secara aktif dalam tahap

perencanaan dan pengambilan keputusan. Kurangnya keterlibatan ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya kapasitas teknis untuk berkontribusi. Selain itu komunikasi yang tidak efektif Antara pemerintah dan masyarakat seringkali memperburuk situasi. Kurangnya komunikasi ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat proyek, serta prosedur yang akan dijalankan. Akibatnya saat terjadi penggusuran lahan untuk pembangunan jalan usaha tani, masyarakat seringkali tidak mendapatkan kompensasi yang memadai atau bahkan tidak diberi kompensasi sama sekali. Hal ini memicu penolakan dan resistensi dari masyarakat, yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.

Ketiadaan komunikasi yang baik dan transparan tidak hanya menimbulkan konflik sosial tetapi juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Proyek pembangunan yang seharusnya membawa manfaat justru dapat menimbulkan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat yang terdampak langsung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan keterlibatan dan komunikasi yang efektif sehingga proyek pembangunan jalan usaha tani dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Informan berjumlah 8 orang, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan Reduksi Data, Data display (penyajian data), Penarikan Kesimpulan/atau Verifikasi.

PEMBAHASAN

Pembuatan Keputusan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembangunan jalan usaha tani di desa ini telah melibatkan masyarakat melalui musyawarah atau pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa. Musyawarah ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat mengenai rencana pembangunan, dengan tujuan agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan mereka. Proses ini juga mencakup

keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat, yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat yang ada di desa tersebut. Kehadiran tokoh adat sangat penting, terutama dalam hal penggunaan tanah adat, yang membutuhkan persetujuan dari komunitas adat.

Meskipun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut tidak selalu maksimal. Beberapa pihak merasa bahwa proses musyawarah yang ada belum sepenuhnya memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam memastikan bahwa semua suara masyarakat, termasuk mereka yang mungkin kurang terwakili, dapat tersampaikan dan diperhatikan dalam proses perencanaan. Untuk itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas musyawarah agar lebih inklusif dan partisipatif, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa pembangunan jalan usaha tani ini dilihat sebagai proyek yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam kegiatan pertanian, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian desa. Namun, keputusan untuk melaksanakan proyek ini harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap lahan adat. Dalam konteks ini, keterlibatan tokoh adat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan tanah adat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat adat, dan mendapat persetujuan dari mereka. Proses ini akan membantu menghindari konflik atau ketidakpuasan yang mungkin timbul akibat pengabaian hak-hak adat.

Secara keseluruhan, meskipun proyek pembangunan jalan usaha tani ini menunjukkan upaya pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat melalui musyawarah, tantangan terkait dengan keterlibatan maksimal dari semua pihak masih perlu diperbaiki. Proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan partisipatif akan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan diterima oleh semua pihak. Selain itu, penting untuk terus menjaga keterlibatan tokoh adat dalam setiap tahap pembangunan, guna memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, tanpa menimbulkan konflik atau ketidakpuasan.

Pelaksanaan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalan usaha tani, terlihat adanya beberapa masalah yang perlu diperhatikan meskipun pada umumnya proyek ini membawa dampak positif bagi sebagian masyarakat. Salah satu isu utama yang muncul adalah masalah penggusuran lahan tanpa kompensasi, yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai ketidakadilan. Meskipun proyek ini dianggap sebagai inisiatif pembangunan untuk kepentingan bersama, kenyataannya beberapa warga yang terdampak merasa bahwa mereka tidak mendapat penggantian atau kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Masalah ini menyoroti pentingnya dalam setiap proyek pembangunan untuk memperhatikan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat yang tanahnya terkena dampak langsung. Tanpa adanya kompensasi atau solusi yang memadai, ketidakpuasan bisa berkembang, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum serta kontraktor, memang sudah dilakukan melalui rapat koordinasi. Namun, meskipun komunikasi tersebut sudah terbentuk dalam bentuk musyawarah dusun, ada kesan bahwa beberapa pihak merasa belum sepenuhnya puas dengan hasilnya, terutama terkait dengan penggusuran lahan tanpa kompensasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai bagaimana seharusnya hak-hak masyarakat dilindungi dalam proses pembangunan. Proses komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif sangat penting agar masalah yang muncul bisa segera teridentifikasi dan diselesaikan dengan cara yang adil bagi semua pihak.

Dari perspektif adat, pelaksanaan proyek pembangunan ini juga harus mengedepankan prinsip-prinsip yang ada dalam aturan adat setempat. Masyarakat adat memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tanah dan cara-cara tradisional dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sehingga setiap proyek yang melibatkan tanah adat harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan menghormati aturan adat yang berlaku. Penggusuran lahan yang tidak sesuai dengan aturan adat atau tanpa memberikan kompensasi yang memadai bisa menyebabkan konflik dengan tokoh adat dan masyarakat adat, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelancaran proyek. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan tokoh adat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta mengadakan musyawarah adat untuk mencapai

kesepakatan yang adil dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Jika diperlukan, penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan sanksi adat, yang diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Secara keseluruhan, meskipun proyek pembangunan jalan usaha tani memberikan manfaat yang jelas dalam hal kemudahan akses dan peningkatan produktivitas bagi sebagian masyarakat, keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik aksesibilitas yang diberikan. Ketidakpuasan yang timbul akibat penggusuran lahan tanpa kompensasi, serta ketidaksempurnaan dalam pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, harus segera diatasi agar dampak negatif dari proyek ini bisa diminimalkan. Dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan adat, proyek pembangunan ini bisa lebih diterima oleh semua pihak dan memberikan manfaat yang lebih merata serta berkelanjutan.

Menerima Manfaat

Hasil penelitian terkait pembangunan jalan usaha tani menunjukkan adanya perbedaan dalam persepsi dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, yang sebagian besar bergantung pada kedekatan mereka dengan jalan yang dibangun serta status sosial dan hak adat mereka. Secara umum, proyek ini memberikan manfaat signifikan bagi kelompok masyarakat yang memiliki lahan pertanian di sekitar area pembangunan jalan. Akses yang lebih baik ke lahan pertanian mereka memungkinkan proses pengangkutan hasil pertanian menjadi lebih efisien dan lancar, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Kelompok ini merasa proyek ini berhasil dalam mendukung kegiatan pertanian mereka, bahkan memberi dampak positif terhadap perekonomian keluarga mereka.

Namun, proyek ini tidak sepenuhnya memberikan manfaat yang merata di seluruh kelompok masyarakat. Sebagian masyarakat yang memiliki lahan yang lebih jauh atau akses terbatas ke jalan belum merasakan manfaatnya secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses jalan mempermudah sebagian besar masyarakat, ada kelompok lain yang mungkin masih tertinggal atau kesulitan untuk mendapatkan manfaat yang sama. Oleh karena itu, pengembangan proyek serupa di masa depan perlu memperhatikan keberagaman kondisi dan kebutuhan masyarakat di seluruh area proyek, bukan hanya pada sebagian kelompok yang paling mudah dijangkau.

Lebih lanjut, beberapa kelompok masyarakat merasa dirugikan akibat pembangunan jalan, terutama mereka yang terkena dampak langsung seperti penggusuran lahan tanpa kompensasi. Dampak negatif ini sangat terasa bagi mereka yang kehilangan lahan atau harus berhadapan dengan berkurangnya luas lahan yang mereka miliki, yang berakibat pada penurunan pendapatan mereka. Hal ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap aspek sosial dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan, agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau dirugikan. Keadilan dalam pemberian kompensasi atau solusi alternatif sangat diperlukan agar semua pihak yang terdampak bisa tetap merasakan manfaat dari proyek ini.

Dari perspektif adat, dampak proyek terhadap masyarakat adat juga menjadi perhatian utama. Jika pembangunan jalan merusak lahan adat atau tidak memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat adat, maka proyek tersebut bisa dianggap tidak memberikan manfaat yang merata. Masyarakat adat yang selama ini bergantung pada cara-cara tradisional dalam mengelola lahan pertanian dan mempertahankan hak-hak adat mereka, bisa merasa bahwa perubahan yang dibawa oleh proyek tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip adat mereka. Untuk itu, agar manfaat proyek ini dapat diterima secara luas, perlu adanya pendekatan yang lebih sensitif terhadap hak-hak adat dan penghormatan terhadap cara-cara tradisional yang telah lama dijalankan. Pemberian kompensasi yang adil dan proses musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat setempat sangat diperlukan untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Secara keseluruhan, meskipun pembangunan jalan usaha tani memberikan manfaat yang signifikan bagi sebagian besar masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses dan peningkatan produktivitas, masalah penggusuran lahan tanpa kompensasi dan ketidaksamaan dalam pembagian manfaat antar kelompok masyarakat harus menjadi perhatian utama. Agar dampak negatif ini dapat diminimalkan, perencanaan dan pelaksanaan proyek di masa depan harus lebih inklusif dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta nilai-nilai adat yang ada di masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, akan sangat membantu untuk memastikan bahwa manfaat dari proyek ini dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan Masyarakat

Evaluasi

Dari kesimpulan hasil penelitian tentang pembangunan jalan usaha tani di Desa Fafinesu A, terdapat beberapa poin penting yang perlu dibahas

lebih lanjut. Penilaian terhadap keberhasilan proyek ini bervariasi, tergantung pada sudut pandang masyarakat dan pihak terkait. Secara umum, proyek ini dianggap berhasil oleh masyarakat yang merasakan manfaat langsung, seperti kemudahan akses ke lahan pertanian dan efisiensi dalam transportasi hasil tani. Keberhasilan proyek dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani menjadi indikator utama yang diterima oleh masyarakat.

Namun, meskipun ada hasil positif yang dirasakan, terdapat evaluasi yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proyek ini perlu diperbaiki. Salah satu kritik utama adalah kurangnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka seharusnya memiliki lebih banyak kesempatan untuk memberikan masukan, terutama dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proyek ini berhasil dari segi fisik dan ekonomi, aspek partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perlu diperhatikan untuk memastikan proyek lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, evaluasi juga menyoroti pentingnya memperbaiki komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proyek. Komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih cepat dan mencari solusi yang lebih tepat sasaran. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, kebutuhan dan masalah yang mungkin tidak terlihat pada tahap perencanaan bisa segera diatasi, dan hasil yang diperoleh dapat lebih optimal. Evaluasi ini juga menekankan bahwa agar manfaat dari proyek ini dapat dirasakan secara adil, semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling terpinggirkan, harus merasakan dampak positif dari pembangunan jalan usaha tani ini.

Dari perspektif adat, penilaian terhadap proyek ini menunjukkan bahwa pentingnya menghormati hak adat dan nilai-nilai tradisional dalam setiap proyek pembangunan. Proyek yang melibatkan tokoh adat dan menghormati aturan adat cenderung mendapatkan penilaian positif. Sebaliknya, proyek yang tidak memperhatikan hak-hak adat atau merusak lahan adat tanpa kompensasi yang adil dapat menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, saran dari tokoh adat yang meminta agar musyawarah adat dilibatkan sejak awal proyek sangat penting untuk mencegah adanya ketegangan sosial dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan adat setempat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memastikan keberhasilan proyek pembangunan jalan usaha tani yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dibutuhkan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat, bukan hanya dalam pelaksanaan tetapi juga dalam perencanaan dan evaluasi. Selain itu, penghormatan terhadap hak-hak adat serta komunikasi yang transparan dan efektif antara pemerintah dan masyarakat harus menjadi bagian penting dari setiap proyek pembangunan. Dengan demikian, proyek tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga akan diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat, menjaga harmoni sosial, dan memperkuat keberlanjutan pembangunan di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian erkait pembangunan jalan usaha tani di desa, dapat disimpulkan bahwa ; (1) Pembuatan Keputusan Proses pengambilan keputusan dalam pembangunan jalan usaha tani di desa ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan tokoh adat. Meskipun ada upaya untuk mengakomodasi pendapat masyarakat melalui musyawarah, beberapa kelompok merasa keterlibatannya belum maksimal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan inklusivitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginan seluruh masyarakat; (2) Pelaksanaan, elaksanaan proyek pembangunan jalan usaha tani telah membawa dampak positif berupa peningkatan aksesibilitas dan efisiensi transportasi hasil tani. Namun, terdapat beberapa masalah terkait penggusuran lahan tanpa kompensasi, yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sebagian masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan perlu lebih diperkuat agar proyek berjalan dengan lebih adil dan transparan.; (3) Menerima Manfaat, Manfaat dari pembangunan jalan usaha tani dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama petani yang memiliki lahan di sekitar jalan. Akses yang lebih mudah membuat transportasi hasil pertanian lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Namun, ada kelompok masyarakat yang merasa dirugikan, terutama mereka yang terdampak penggusuran tanpa kompensasi atau mereka yang tidak merasakan manfaat secara langsung. Oleh karena itu, penting untuk memastikan manfaat tersebut lebih merata bagi seluruh kelompok masyarakat; (4) Evaluasi Evaluasi terhadap pembangunan jalan usaha tani menunjukkan bahwa meskipun proyek ini memberikan manfaat, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti transparansi dalam pemulihan

dan pelibatan lebih lanjut masyarakat dalam pengambilan keputusan. Proses evaluasi yang melibatkan masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan proyek di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha ilmu. Yogyakarta.
- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.Agung.
- AB Susanto, 2007, A Strategic Management Approach, CSR, The Jakarta Consulting Group, JakartaTerhadap Perkembangan Fisik Kota dan Kegiatan Perdagangan/Jasa di Kawasan Koridor Jalan Lingkar Soekarno-Hatta Kota Palembang. Jurnal Bumi Indonesia.
- Depdikbud. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. The Liang Gie (1989:26). Pengertian Analisis.
- Daulay (2019).”Analisis Kriteria Dan Bobot Untuk Penentuan Lokasi Jalan Pertanian”.
- Development in the Third World (1982:14). Definisi Pembangunan. Afifuddin. (2012:42).
- Herdiyansyah,(2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu*.
- Handoko.(2000 : 24). Analisis Secara Sistematik.Soejadi.(1997 : 107) . Tentang Konsep Analisis..
- Iskandar Kato dkk, Manajemen Pembangunan Daerah (Sumatra Utara; Yayasan Kita Menulis,2021), 52.
- Komaruddin (1994: 31). *Pengertian Analisis*. The Liang Gie (1989:26). Pengertian Analisis.
- Melong, (2004). *Metode Penelitian Kualitatif (EdisiRevisi)*. Bandung:RemajaRosdakarya.Siregar, B.S. 2001. Penggemukan Sapi. Cetakan keenam. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita. (2006). Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong Bratakusumah, 2005 : Peran Masyarakat dalam Pembangunan, Multigrafika, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Ndralha, T.(1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Iskandar Kato dkk, Manajemen Pembangunan Daerah (Sumatra Utara; Yayasan Kita Menulis,2021), 52.
- Soejadi. 1997. "Analisis Manajemen Modern", Jakarta: Haji Masagung.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Siagian. Dalam Admisitrasi Pembangunan (1994). Mendefinisikan Pengertian Pembangunan.
- Siagian S P, 2005, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara, Tjokroamidjojo, Bintoro. 2006. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES
- Siregar (2011). Fungsi Jalan Usaha Tani.
- Sastropoetra (1995 :91). Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha tani (2018).Jalan Usaha Tani.
- Sastropoetra (1995 :91). Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha tani (2018). Jalan Usaha Tani.
- WHO.2010. Infant mortality. World Health Organization.Scheetz and Bloser (2010). Pengertian Jalan Usaha Tani.
- Peraturan Undang-udang**
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4). Menjelaskan Tentang Pengertian Jalan Pasal 5 Undang-Undang 38 Tahun 2004.Peran jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.